

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.

Danialsyah, Ridwan, Gomgom. (2023). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Medan.: Cv. Sentosa Deli Mandiri.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Nurdin, Z. (2020). *Buku Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*. Elmarkazi.

Rohmadi, R. (2023). *Prosedur Dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan: Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.

Rosadi, A. (2021). *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. UMM Press.

B. JURNAL

Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.

Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11-21.

- Intihani, S. N. (2024). Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 6(1), 84-98.
- Iqbal, I. (2025). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Cacat Hukum. *Sakato Law Journal*, 3(1), 122-130.
- Putri, S. D. F. A. (2025). Keabsahan Impotensi Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang–Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 290/Pdt. G/2024/Pa. Btl). *Dinamika*, 31(1), 11816-11828.
- Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*, 8(2), 157-167.
- Sabekti, M., & Ramasari, R. D. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1109/Pdt. G/2023/PA. TNK). *Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(2), 755-763.
- Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 163-179.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.

Yasa, I. W., & Iriyanto, E. (2023). Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata. *Jurnal Rechtsens*, 12(1), 33-48.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW), Staatblad Tahun 1847 Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 1, Tambahan Lembaran RI Nomor 3096).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran RI Nomor 4358).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5077).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

D. LAIN-LAIN

E-court Mahkamah Agung Republik Indonesia “*Registrasi Perkara*” e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System. Diakses pada 2 Mei 2025, 11.20 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia “*Delapan Nilai Mahkamah Agung*”/ <https://www.pn-jakartabarat.go.id/>. Diakses pada 17 April 2025, 20.00 WIB.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus *"Tentang Pengadilan"*.

<https://www.pn-jakartabarot.go.id/>. Diakses pada 7 Mei 2025, 18.00 WIB.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat *"Informasi*

Perkara, Court Calender. https://www.sipp.pn-jakartabarot.go.id/list_perkara/search,

. Diakses pada 9 Mei 2025, 15.30 WIB.

Wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A

"Proses Pengajuan Gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus". Hasil wawancara pribadi pada hari Kamis, 20 Februari 2025, 10.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus

"Proses Penyelesaian Gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus". Hasil wawancara pribadi pada hari Jumat, 20 Maret 2025, 13.30 WIB.